

Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Perempuan dalam Kerangka Visi 2030

Bhilla Alifitria

Magister Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

e-mail : bhilla.alifitria24@gmail.com

Abstract

Saudi Vision 2030 changes domestic policy and Saudi Arabia's foreign policy landscape. Saudi Arabia is trying to change its position on the international stage by involving more women's contributions. This research aims to explain Saudi Arabia's foreign policy regarding women within the framework of Vision 2030. This research used qualitative methods with secondary data from various literature sources, such as books, journal articles, and official documents. The data was analyzed using James N. Rosenau's foreign policy concept, consisting of orientations, commitments or action plans, and forms of behaviour. This research finds that Saudi Arabia's exposure within the Vision 2030 framework is as a tourist destination, financial and commercial centre, as well as a trade centre for a leading exporter of clean energy by including women's involvement. Commitment or action plans are demonstrated through the ambitious master plan contained in Vision 2030. Some forms of behaviour are presented, including cooperation with Sweden regarding the SHE-Leads Program and cooperation with Korea regarding the involvement of Korean companies in Biban.

Keywords: *foreign policy, Saudi Arabia, women entrepreneurship, Saudi Vision 2030.*

Abstrak

Visi Saudi 2030 tidak hanya mengubah kebijakan dalam negeri, tetapi juga mengubah lanskap kebijakan luar negeri Arab Saudi. Arab Saudi sedang berusaha mengubah posisinya di panggung internasional dengan lebih melibatkan kontribusi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait perempuan dalam kerangka Visi 2030. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi.

Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari James N. Rosenau yang terdiri dari seperangkat orientasi, komitmen dan rencana tindakan, serta bentuk perilaku. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi Arab Saudi dalam kerangka Visi 2030 adalah sebagai tujuan wisata, pusat keuangan dan komersial, serta pusat perdagangan eksportir terkemuka energi bersih dengan menyertakan keterlibatan perempuan. Komitmen atau rencana tindakan ditunjukkan melalui rencana induk ambisius yang terdapat di dalam Visi 2030. Sementara, bentuk perilakunya ditunjukkan diantaranya melalui kerja sama dengan Swedia terkait SHE-Leads Program, dan kerja sama dengan Korea terkait keterlibatan perusahaan Korea di Biban.

Kata kunci: Arab Saudi, kebijakan luar negeri, kewirausahaan perempuan, Visi Saudi 2030

Pendahuluan

Arab Saudi merupakan negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada syariah atau hukum Islam. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, masyarakat Arab Saudi dipengaruhi oleh wacana keagamaan tidak resmi yang berkembang dari wacana keagamaan murni menjadi religopolitik, terutama setelah Perang Teluk pada tahun 1991. Tren ini terutama karena tidak adanya wacana tandingan yang turut membentuk pola pikir sosial saat ini dan struktur budaya masyarakat Arab Saudi dengan kompleksitas dan inkonsistensi yang mendasarinya. Hal ini tidak terlepas dari adanya faktor sosial yang menjadi tantangan besar bagi perempuan karena mempertahankan norma dan persepsi yang berlaku, termasuk dalih “eksklusif” (*khususyiyah*) yang merupakan persepsi banyak orang Arab Saudi mengenai masyarakat dan budaya mereka. Selain itu, negara ini juga merupakan tempat kelahiran Islam dan merupakan tempat dua kota paling suci bagi agama tersebut, sehingga Arab Saudi harus melestarikan identitas dan karakteristik sosial yang berbeda (Alhussein, 2014).

Identitas Islam dan karakteristik sosial yang berbeda dari masyarakat Arab Saudi tersebut kemudian sering memunculkan isu ketimpangan gender di Arab Saudi. Hal ini karena Arab Saudi juga memiliki budaya unik dalam sejarah yang memberikan dampak peraturan dan regulasi konservatif yang mempengaruhi dan cenderung membatasi perempuan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, Arab Saudi juga telah mengembangkan reputasi sebagai negara yang lebih membatasi mobilitas dan aktivitas publik perempuan dibandingkan negara Arab lainnya, karena penerapan prinsip-prinsip Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. Namun, terdapat beberapa ulama yang

juga berpendapat bahwa pembatasan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap perempuan justru mendorong terjadinya ketidaksetaraan gender (Al-Sanea, 2022).

Menurut Global Gender Gap Report, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling tidak setara gender di dunia dan berada di peringkat 138 dari total 144 negara yang mencerminkan tingginya kesenjangan gender dalam pemberdayaan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, ketidaksetaraan upah pada pekerjaan menunjukkan bahwa perempuan berada pada kondisi yang paling buruk sebesar 40% dan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja hanya sebesar 21% dibandingkan dengan laki-laki sebesar. Walaupun Arab Saudi telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal angka melek huruf perempuan dalam beberapa dekade terakhir (96,5% laki-laki dan 91% perempuan dewasa), tetapi kemajuan dalam kegiatan ekonomi perempuan masih cenderung lambat. Selain itu, rasio perempuan terhadap laki-laki dalam hal tingkat partisipasi angkatan kerja juga hanya 0,26 (World Economic Forum, 2017).

Namun demikian, peran-peran tradisional perempuan mulai beralih pada masa kepemimpinan Raja Abdullah yang lebih terbuka, perempuan Arab Saudi mulai mencari persamaan terhadap hak – hak perempuan, dan Pemerintah Arab Saudi pun mulai berfokus pada pengembangan pendidikan, sikap, politik, dan ekonomi (Aljazeera, 2015). Hal ini berlanjut ketika kepemimpinan Muhammad bin Salman, ketika muncul kebijakan perempuan mulai diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan, mengikuti pemilu, memasuki stadion, dan menonton bioskop. Perubahan-perubahan tersebut juga tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya adalah reformasi Pemerintah Arab Saudi terkait Saudi Vision 2030 atau Visi Saudi 2030 pada tahun 2016 (Syed, Ali, & Hennekam, 2018).

Visi Saudi 2030 merupakan rencana transformatif dan ambisius untuk membuka potensi besar Arab Saudi dengan menciptakan negara yang terdiversifikasi, inovatif, dan terdepan di dunia demi kepentingan generasi yang akan datang. Visi Saudi 2030 juga mengacu pada kekayaan sejarah, warisan dan budaya, lokasi strategis dan kekuatan ekonomi Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk membebaskan Arab Saudi dari ketergantungannya terhadap ekspor minyak. Visi ini telah mengantarkan era baru diversifikasi dan peluang ekonomi yang didorong oleh investasi pada sektor-sektor utama dan strategis. Selain itu, Visi ini juga telah menghasilkan gelombang reformasi yang telah mengubah masyarakat dengan manfaat khusus bagi perempuan dan generasi muda serta untuk pertama kalinya membuka Arab Saudi kepada dunia (Kingdom of Saudi Arabia, 2022).

Berkaitan hal tersebut, Visi Saudi 2030 tidak hanya mengubah kebijakan dalam negeri, tetapi juga mengubah lanskap kebijakan luar negeri Arab Saudi. Arab Saudi

sedang berusaha mengubah posisinya di panggung internasional. Hal ini ditunjukkan ketika Arab Saudi mampu mencapai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2022 untuk pertama kalinya mencapai \$1 triliun dan menginginkan perekonomian yang dapat mengimbangi transisi energi global dan kebijakan luar negeri yang tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Berkaitan dengan perempuan, Muhammad bin Salman melalui Visi Saudi 2030 juga mendukung rencana diversifikasi ekonomi melalui reformasi agama dan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak hak perempuan pada khususnya (Jacobs, 2023). Hal ini ditunjukkan salah satunya ketika Arab Saudi bekerja sama dengan Swedia pada tahun 2017 untuk membangun kewirausahaan perempuan di negaranya. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi mulai membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pembelajaran dan pengalaman dari negara lain (Rasooldeen, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini ingin memfokuskan pada bagaimana kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait perempuan, khususnya terkait *women entrepreneurship* dalam kerangka Visi 2030.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian Adami & Mostaghi (2020) yang menggunakan pendekatan analitis, deskriptif, dan historis berdasarkan reformasi dalam negeri dan Visi 2030 untuk menyimpulkan bahwa kebijakan regional Arab Saudi berasal dari upaya Riyadh untuk kembali ke situasi sebelum tahun 2011, bukan dari revisionisme Saudi. Alreshoodi, et al. (2022) menulis bahwa faktor-faktor yang memotivasi perempuan Arab Saudi dalam berwirausaha antara lain adalah hasrat, peluang, ketidakpuasan dan dukungan keluarga. Selain itu, penelitian Winarni & Permana (2022) yang menyatakan bahwa norma, reputasi Arab Saudi, sosial dan budaya politik, dan citra Muhammad bin Salma yang menjadi penghambat konstruksi identitas Arab Saudi. Oleh karena itu, berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin memfokuskan bagaimana kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait perempuan, khususnya terkait *women entrepreneurship* dalam kerangka Visi 2030.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berdasarkan pada deskripsi dan penjelasan yang bermakna. Penelitian kualitatif berfokus pada masalah penelitian, data yang akan dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut akan dikelola dan dianalisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait perempuan khususnya *women entrepreneurship* dalam kerangka Visi 2030. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi. Data tersebut juga dikelola dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Landasan Konseptual Kebijakan Luar Negeri

Hermann mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara yang terbentuk dari keputusan individu atau kelompok serta menolak gagasan bahwa studi kebijakan luar negeri adalah studi tentang kebijakan (Hermann, 1978, dalam Neack, 2019). Namun demikian, Bruce Russett, Harvey Starr, dan David Kinsell menganggap kebijakan sebagai program yang berfungsi sebagai panduan perilaku yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan organisasi untuk dirinya sendiri (Russet, et al., 2000, dalam Neack, 2019). Dalam hal ini, mereka memandang kebijakan luar negeri sebagai panduan dalam mengambil tindakan di luar batas negara untuk memajukan tujuan negara tersebut. Para ahli tersebut juga menekankan bahwa studi kebijakan luar negeri harus melibatkan studi tentang formulasi dan implementasi kebijakan (Neack, 2019).

Lebih lanjut, Deborah Gerner mendefinisikan kebijakan luar negeri lebih jauh yakni sebagai niat, pernyataan, dan tindakan seorang aktor atau suatu negara yang diarahkan ke dunia luar dan respon aktor lain terhadap niat, pernyataan, dan tindakan tersebut. Gerner menggabungkan penekanan Hermann pada perilaku dengan penekanan Russett, Starr, dan Kinsella pada program atau panduan. Dalam hal ini, Gerner lebih menekankan kebijakan luar negeri pada keadaan, dan aktor-aktor lain seperti kelompok agama, bisnis, dan lainnya dalam sistem internasional yang menetapkan standar dan tujuan yang mengarahkan bagaimana mereka berinteraksi dengan aktor internasional lainnya (Gerner, 1995, dalam Neack, 2019).

Selanjutnya, Laura Neack memfokuskan kebijakan luar negeri pada aktor negara-sentris. Neack menyatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah sub-bidang hubungan internasional yang dengan sendirinya merupakan sub-disiplin ilmu politik. Dalam hubungan internasional, unit analisis utama adalah negara. Dalam politik internasional, negara adalah aktor politik utama dengan hak dan kedudukan hukum di atas semua aktor lainnya. Dalam hal ini, Neack mengungkapkan terdapat dua ciri penting dari studi kebijakan luar negeri, yakni: (1) kebijakan luar negeri terjadi di antara persimpangan yang kompleks antara lingkungan domestik dan internasional; (2) kebijakan luar negeri yang seringkali dihasilkan dari politik yang rumit dan melibatkan banyak aktor baik dari kelompok domestik atau internasional yang berbeda (Neack, 2019).

Sementara, James N. Rosenau (1976) berpendapat bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya mencakup tiga hal yakni: (1) sekelompok orientasi; (2) seperangkat komitmen dan rencana tindakan; (3) bentuk perilaku. Sekelompok orientasi dalam hal ini mengacu pada persepsi, nilai atau sikap yang berasal dari pengalaman sejarah suatu negara dan keadaan strategis yang menjadi tanda keberadaannya dalam politik

internasional. Hal itu berguna sebagai acuan ketika suatu negara harus mengambil tindakan karena adanya kondisi eksternal tertentu. Komitmen dan rencana tindakan yakni berupa sarana atau tujuan tertentu yang menyatukan strategi, kebijakan dan keputusan ketika negara terkait dengan lingkungan eksternalnya. Bentuk perilaku terdiri dari kegiatan atau langkah-langkah konkret dari fase empiris kebijakan luar negeri. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang di atas maka kebijakan luar negeri merupakan perilaku eksternal suatu negara. Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada Orientasi Strategi, Komitmen/ Rencana Tindakan (Taktis), Bentuk Perilaku (Operasional) Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Perempuan dalam Kerangka Visi 2030, khususnya terkait Women Entrepreneurship di Saudi.

Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Entrepreneur atau pengusaha dapat didefinisikan sebagai orang yang memaksimalkan peluang (Drucker, P.F. 1964 dalam Tiwari, 2017). Menurut Weber, semangat kapitalisme mendorong aktivitas kewirausahaan di masyarakat mana pun (Weber, M. 1947 dalam Tiwari, 2017). Menurut Hagen, kelompok marginal dalam masyarakat menggunakan kewirausahaan untuk mencapai kesetaraan dan rasa hormat (Hagen, E, 1960 dalam Tiwari, 2017). Sementara itu, Cochran mempertimbangkan nilai-nilai budaya, peran harapan masyarakat dimana pengusaha beroperasi dan kemampuan wirausaha sebagai faktor kunci yang menjelaskan aktivitas kewirausahaan dalam konteks yang berbeda (Cochran, T.C. 1968 dalam Tiwari, 2017). Menurut Casson, faktor ekonomi makro mendorong atau menghambat kewirausahaan (Casson, M. 1982 dalam Tiwari, 2017). Dengan demikian, pengusaha adalah pelaku ekonomi yang mengambil risiko dengan harapan memperoleh keuntungan. Dalam prosesnya, pengusaha muncul sebagai inovator dan pengambil keputusan yang sadar, dan mengarah pada penyempitan kesenjangan pasar yang timbul karena ketidaksempurnaan pasar. Dalam hal ini, kewirausahaan telah ditetapkan menjadi sesuatu yang sangat penting baik bagi negara maju, berkembang, maupun dalam transisi.

Lebih lanjut, menurut Dr. S. Ganapathy dan C. Mayilsamy (2013), pengusaha perempuan dapat didefinisikan sebagai perempuan atau sekelompok perempuan yang mulai mengatur dan menjalankan usaha. Pengusaha perempuan terjun dalam dunia usaha disebabkan adanya faktor pendorong dan penarik yang mendorong perempuan untuk mempunyai pekerjaan mandiri dan berdiri di atas kaki mereka sendiri. Sementara, rasa ingin mengambil keputusan secara mandiri dalam kehidupan dan karir mereka adalah faktor motivasi di balik hal tersebut. Secara umum, perempuan dibebani dengan tanggung jawab rumah tangga yang kemudian membuat perempuan ingin mendapatkan kemandirian. Selain itu, di bawah pengaruh faktor-faktor tersebut, pengusaha perempuan memilih profesi sebagai tantangan dan sebagai rekomendasi

untuk melakukan sesuatu yang baru. Keadaan seperti ini disebut sebagai faktor penarik. Sementara, pada faktor pendorong, perempuan terjun dalam dunia usaha karena adanya kewajiban keluarga dan tanggung jawab yang ada pada mereka.

Dengan demikian, pengusaha perempuan dapat didefinisikan sebagai perempuan yang memiliki kendali keuangan dominan atas usaha mereka, yang memilih atau didorong karena suatu keharusan untuk mengambil peran yang menantang sebagai wirausaha dan mulai mengatur dan mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pengusaha perempuan juga mengambil keputusan secara sadar untuk mengelola usaha mereka. Dalam hal ini, kewirausahaan perempuan juga mengarah pada pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan (Tiwari, 2017).

Lebih lanjut, Ganapathy dan Mayilsamy (2013) juga menjabarkan bahwa ada beberapa hambatan yang dapat dihadapi oleh pengusaha perempuan terutama ketika memulai usaha baru atau bertujuan untuk pertumbuhan lebih lanjut, seperti:

- Penambahan modal merupakan hambatan utama yang dihadapi pengusaha perempuan.
- Pembiayaan awal, kredit, dan manajemen arus kas pada tahap awal bisnis juga menjadi hambatan terbesar. Kebanyakan pendanaan biasanya melalui pinjaman keluarga, tabungan pribadi, kartu kredit dan pinjaman ekuitas rumah.
- Kurangnya dukungan jaringan merupakan hambatan lain yang umum yang harus diatasi oleh pengusaha perempuan. Dalam hal ini, perusahaan mereka berjuang melawan lingkungan kerja yang didominasi laki-laki, sehingga menjadi sangat penting bagi perempuan untuk memiliki sub-jaringan yang akan menguntungkan dalam konteks komunitas berbasis gender.

Lebih lanjut, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kewirausahaan perempuan, antara lain:

- Pelatihan keterampilan kejuruan dan bisnis yang dapat memberdayakan pengusaha perempuan.
- Fokus pada keterampilan pemberdayaan pribadi.
- Pendekatan partisipatif yang inovatif terhadap pembentukan pendidikan dan pemecahan masalah daripada metode tradisional.
- Menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi wirausaha perempuan dengan memulai kebijakan makroekonomi

- Membentuk skema pendanaan khusus yang membantu mereka meningkatkan modal.

Orientasi Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Perempuan dalam Kerangka Visi 2030

Arab Saudi telah tercatat sebagai negara konservatif sejak Ibnu Saud mendirikan proyek politik ekspansionis dengan mengkonsolidasikan komunitas suku Arab dan melalui dukungan agama dari Mohammed bin Abdul Wahab. Dengan demikian, kemajuan pemikiran dan kebudayaan tidak berkembang karena pemerintah bertindak tegas melarang norma-norma di luar peraturan pemerintah. Namun, terlepas dari situasi tersebut, persaingan internasional antar negara menuntut Arab Saudi untuk memilih antara akan beradaptasi dan menerima dinamika globalisasi, atau mereka akan tertinggal. Kondisi tersebut yang kemudian menyebabkan Arab Saudi melakukan reformasi dinamis di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Potter, 2017).

Pada tahun 2016, melalui putra mahkota, Muhammad bin Salman, Arab Saudi membuat gagasan untuk memoderasi negara dengan mengubah struktur, termasuk mengubah sosial budaya negara untuk mereformasi identitas Arab Saudi. Ide perubahan tersebut terangkum di dalam Visi Saudi 2030 yang berdampak pada berbagai sektor di Arab Saudi. Visi Saudi 2030 tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi Arab Saudi di berbagai aspek, seperti teknologi dan isu sosial budaya masyarakat Arab Saudi. Fenomena-fenomena seperti masyarakat Arab Saudi bisa pergi ke bioskop, perempuan bisa memasuki stadion sepak bola, dan mereka bisa mengendarai mobil tanpa didampingi wali atau kerabatnya, merupakan fenomena perubahan sosial yang belum pernah terjadi sebelum Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota. Dalam hal ini, Salman menyatakan bahwa hiburan dan budaya sangat penting untuk mengubah standar hidup warga negara Arab Saudi dalam waktu singkat (Trofimov, 2019).

Adanya Visi 2030 telah mengubah persepsi kebijakan luar negeri Arab Saudi dengan mengkalibrasi ulang kebijakan luar negerinya untuk melepaskan pengekangan dan mengambil posisi lindung nilai di antara negara-negara adidaya demi melindungi kepentingan dan keamanannya. Kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam kerangka Visi 2030 juga sangat selaras dengan inisiatif pembangunan ekonomi negara tersebut yang bertujuan untuk beralih dari perekonomian yang bergantung pada minyak mentah dan menjadi Arab Saudi sebagai tujuan wisata, pusat keuangan dan komersial, serta pusat perdagangan eksportir terkemuka energi bersih (Atta, 2023). Dalam mencapai Visi 2030, kebijakan luar negeri Arab Saudi berfokus pada kontribusi perempuan terhadap perekonomian dan partisipasi mereka dalam pembangunan sosial, sehingga women entrepreneurship semakin dikenal di Arab Saudi. Dalam hal ini, proyeksi kebijakan luar

negeri Arab Saudi telah berubah pandangan bahwa ketika partisipasi perempuan di dalam dunia kerja dan masyarakat meningkat, maka dunia usaha dihadapkan pada meningkatnya peluang yang menyasar pada perempuan Arab Saudi, karena mereka akan menjadi lebih penting dalam pembangunan ekonomi negara tersebut beserta pasar konsumennya, terutama sektor bisnis terkait fashion dan aksesoris, kebugaran serta kesehatan. Dengan demikian, arah kebijakan luar negeri Arab Saudi saat ini telah memandang bahwa perempuan Saudi memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan sumber daya manusia di negara tersebut, dan pemberdayaan mereka sangat penting dalam transformasinya (Ho, 2019).

Visi Saudi 2030 sebagai Komitmen/ Rencana Tindakan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait *Women Entrepreneurship* (Taktis)

Visi Saudi merupakan rencana induk ambisius yang mencakup tiga aspek, yakni: (1) melakukan diversifikasi ekonomi berbasis minyak untuk menggabungkan teknologi dan pariwisata; (2) menjadikan Arab Saudi sebagai jantung Islam dan budaya Arab, dan; (3) menjadi negara yang maju pusat ekonomi dan geografis yang menghubungkan tiga benua. Muhammad bin Salman secara langsung memprakarsai dan memperkenalkan Visi Saudi 2030, walaupun hal tersebut tidak berarti bahwa program tersebut akan diterima sepenuhnya oleh masyarakat Arab Saudi dan Dunia Islam. Dalam hal ini, Visi Saudi 2030 juga memiliki serangkaian hambatan, seperti hambatan yang berasal dari Kerajaan Arab Saudi sendiri. Apabila Visi Saudi 2030 berhasil dan terealisasi sesuai sasaran maka akan mengancam norma dan budaya yang telah ada dan akan membangun norma dan budaya baru dalam struktur pemerintahan Arab Saudi, termasuk perubahan dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, ketika Muhammad bin Salman mendeklarasikan Visi Saudi 2030, ia mendapatkan tentangan dari pihak-pihak yang menuduhnya telah melanggar tradisi. Ia juga dituduh mengubah ide-ide konservatif menjadi ide-ide modern (Farouk & Brown, 2021). Beberapa tujuan Visi Saudi 2030 seperti yang tercantum dalam *The Kingdom of Saudi Arabia* (2016), antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas untuk menyambut pengunjung Umrah dari 8 juta hingga 30 juta setiap tahun;
2. Meningkatkan lebih dari dua kali lipat jumlah situs warisan Arab Saudi yang terdaftar di UNESCO;
3. Menjadikan tiga kota Arab Saudi berada di peringkat 100 teratas kota di dunia
4. Meningkatkan pengeluaran rumah tangga pada kegiatan hiburan dan budaya dari 2,9% hingga 6%;
5. Meningkatkan rasio individu berolahraga setidaknya seminggu sekali dari 13%;

6. Menaikkan posisi dari 26 menjadi 10 dalam Indeks Sosial Kapital;
7. Meningkatkan rata-rata harapan hidup dari 74 tahun menjadi 80 tahun;
8. Menurunkan tingkat pengangguran dari 11,6% menjadi 7%;
9. Meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20% hingga 35%;
10. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22% hingga 30%;
11. Menaikkan posisi ekonomi terbesar di dunia dari ke-19 menjadi 15 teratas;
12. Meningkatkan sektor minyak dan gas dari 40% menjadi 75%;
13. Meningkatkan asset Dana Investasi Publik dari 600 miliar SAR menjadi lebih dari 7 triliun SAR;
14. Membangkitkan posisi dari 25 ke 10 negara teratas dalam Indeks Daya Saing Global;
15. Meningkatkan investasi asing dari 3,8% menjadi tingkat internasional 5,7% dari PDB;
16. Meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40% hingga 65% dari PDB;
17. Menaikkan peringkat global dalam Indeks Kinerja Logistik dari 49 menjadi 25 dan memastikan kerajaan adalah pemimpin regional;
18. Meningkatkan pangsa ekspor non-minyak pada PDB non-minyak dari 16% menjadi 50%;
19. Meningkatkan pendapatan non-minyak pemerintah dari 163 miliar SAR ke 1 Triliun SAR;
20. Menaikkan peringkat di Indeks Efektivitas Pemerintah dari 80 hingga 20;
21. Meningkatkan peringkat pada Indeks Survei E-Government dari posisi 36 menjadi lima negara teratas;
22. Meningkatkan tabungan rumah tangga dari 6% hingga 10% dari total pendapatan rumah tangga;
23. Meningkatkan kontribusi sektor nirlaba terhadap PDB dari 1% hingga 5%, dan;
24. Mengumpulkan satu juta relawan per tahun.

Lebih lanjut, terlepas dari berbagai permasalahan perbedaan pandangan, kekayaan minyak yang dimiliki Arab Saudi juga menjadi tantangan tersendiri bagi masa depan negara tersebut. Ketergantungan ekonomi pada sektor minyak yang luas membuat Arab Saudi makmur sejak ditemukannya sumber daya ladang minyak yang melimpah tersebut pada tahun 1973. Kemakmuran tersebut membuat para anggota kerajaan menikmati kehidupan mewah tanpa harus bekerja keras. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan subsidi untuk kebutuhan masyarakatnya. Subsidi tersebut yang membuat masyarakat menggantungkan kehidupannya pada kompensasi dan pemerintah. Secara tidak langsung, hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan perlahan menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat Arab Saudi (Winarni & Permana, 2022).

Apabila ketergantungan tersebut terus berlanjut, maka akan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan Arab Saudi. Dalam hal ini, Visi Saudi 2030 membutuhkan tenaga kerja yang mengandalkan pengembangan sumber daya manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut, Muhammad bin Salman harus menemukan cara untuk mengubah cara pandang masyarakat Arab Saudi dan menanamkan etos kerja untuk hidup mandiri. Menurut Muhammad bin Salman, Visi Saudi 2030 membutuhkan warga negara, termasuk perempuan, yang memiliki pemikiran kritis, mobilitas, dan keterampilan kerja. Hal ini dinyatakan di dalam situs Saudi Vision 2030: "*together, we will continue building a better country, fulfilling our dream of prosperity and unlocking the talent, potential, and dedication of our young men and women*" (Kingdom of Saudi Arabia, 2016).

Selain itu, implementasi Visi Saudi 2030 juga akan memberikan skema berbeda dalam menerima bantuan dan subsidi bagi masyarakat, terutama melalui privatisasi beberapa sektor dan perombakan sektor minyak. Adanya diversifikasi ekonomi tersebut, sektor perminyakan akan berhenti memberikan bantuan gratis, sehingga masyarakat yang bergantung pada subsidi pemerintah dan mendapatkan bantuan tersebut terkena dampak dan mencoba mencari alternatif lain untuk mencapai kebutuhan mereka. Oleh karena itu, tidak ada solusi yang lebih baik selain meningkatkan keterampilan masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung Visi Saudi 2030 (Winarni & Permana, 2022).

Lebih lanjut, kondisi terburuk akan terjadi jika masyarakat Arab Saudi masih mengharapkan subsidi dari pemerintah tanpa meningkatkan produktivitas. Kondisi ini akan berdampak serius pada masa depan Arab Saudi. Pertambahan jumlah penduduk dan rendahnya kualitas sumber daya manusia akan menjadi permasalahan dan beban berat bagi pemerintah. Secara tidak langsung, kondisi tersebut akan berdampak signifikan terhadap pembentukan dan pengembangan identitas kompetitif Arab Saudi. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat dan keterampilan manusia harus terus dilaksanakan, agar masyarakat dapat menerima transformasi untuk ikut berperan penting dan berkontribusi pada proses transformasi dunia. Dengan demikian, tujuan Visi 2030 yang telah dijabarkan di atas telah menjadi sarana yang menyatukan strategi, kebijakan dan keputusan ketika Arab Saudi terkait dengan negara lain, atau dapat dikatakan bahwa visi tersebut juga telah menjadi komitmen/ rencana tindakan kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait women entrepreneurship.

Bentuk Perilaku Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Women Entrepreneurship (Operasional)

Upaya Arab Saudi dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam mendukung Visi Saudi 2030 ditunjukkan melalui beberapa bentuk implementasi kebijakan luar negerinya terkait *women entrepreneurship*, antara lain ketika Arab Saudi memberikan keputusan bekerja sama dengan Swedia pada tahun 2017 untuk membangun *women entrepreneurship* dengan program bernama SHE-Leads dan terus berlanjut hingga saat ini (*Ministry for Foreign Affairs Government Offices of Sweden*, 2019). Adanya program tersebut dapat membantu pengusaha perempuan Arab Saudi untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, pengembangan jaringan kolaborasi, dan juga meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja (Wirkkala, 2023), sehingga program tersebut dapat turut berkontribusi pada kemajuan ekonomi, sosial, dan kesetaraan gender yang sejalan dengan Visi 2030.

Selanjutnya, Arab Saudi juga menjadi tuan rumah dalam Konferensi Internasional tentang “Perempuan dalam Islam: Status dan Pemberdayaan” bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 2023. Konferensi tersebut didedikasikan untuk menghormati keberhasilan perempuan Muslim sepanjang sejarah dan saat ini. Konferensi tersebut juga bertujuan untuk menyoroti kontribusi perempuan terhadap pembangunan negara-negara anggota OKI dan untuk melawan propaganda negatif yang menggambarkan agama Islam sebagai hambatan terhadap hak-hak perempuan, dan menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu adil dan setara terhadap perempuan. Pertemuan tersebut juga mengkaji potensi pemberdayaan perempuan Muslim dalam pendidikan, pekerjaan, dan berbagai isu terkait perempuan dalam masyarakat kontemporer. Kontribusi ini menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan meningkatkan peran perempuan di bidang pembangunan komprehensif (Organisation of Islamic Cooperation, 2023).

Keterlibatan Arab Saudi di dalam konferensi tersebut tentu dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung Visi 2030, melalui konferensi tersebut dapat menjadi kesempatan untuk membangun jaringan dan kolaborasi antara perempuan Muslim di berbagai sektor, serta dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman dan lingkungan yang mendukung perkembangan karir dan bisnis perempuan. Dengan demikian, Arab Saudi dapat mempercepat pencapaian tujuan Visi 2030 dengan memaksimalkan kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara. Dalam hal ini, pemberdayaan perempuan bukan hanya menjadi tujuan moral, tetapi juga strategi cerdas untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan jangka panjang.

Kebijakan selanjutnya, yakni Arab Saudi melalui CBD Corporate Service, bekerja sama dengan British Business Group Dubai dan Northern Emirates dan British Chamber of Commerce Abu Dhabi mengumpulkan para pengusaha perempuan yang berbasis di Inggris untuk diberikan wawasan tentang lanskap bisnis Arab Saudi untuk mendorong investasi asing langsung ke Arab Saudi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan investasi antara Inggris dan negara Timur Tengah. Pada kegiatan tersebut, para delegasi bertemu dengan pejabat pemerintah dan diplomat untuk meninjau kebiasaan dan praktik bisnis Arab Saudi. Hal ini dilakukan tentu tidak terlepas dari upaya Arab Saudi untuk mendorong keberagaman dan inklusi di tempat kerja pasca Visi 2030. Menurut Kementerian Investasi Arab Saudi, 600 reformasi pro-bisnis dan penyederhanaan peraturan telah diberlakukan sejak dimulainya Visi 2030, dan 80% dari reformasi tersebut telah dilaksanakan. Hasilnya, Arab Saudi menduduki peringkat pertama dalam reformasi kesetaraan gender oleh Bank Dunia pada tahun 2020 dan peringkat pertama di Dewan Kerjasama Teluk untuk kesetaraan gender (Pardo, 2023). Kegiatan tersebut tentu dapat menjadi sarana untuk membuka peluang kolaborasi, investasi, dan pertukaran pengalaman bisnis yang saling menguntungkan bagi pengusaha perempuan Inggris dan Arab Saudi. Selain itu, kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam mencapai visi transformasi ekonomi dan sosial yang diusung oleh Visi 2030, memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua negara dan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, Arab Saudi melalui Kementerian Perdagangan dan Otoritas Usaha Kecil dan Menengah (*Monsha'at*) juga memberikan dorongan bagi ekosistem kewirausahaan yang sedang berkembang dengan membentuk forum acara tahunan bernama "Biban" yang mempertemukan banyak startup, UKM, dan pengusaha terkemuka dunia ke Riyadh untuk berjejaring, bertukar ide, meningkatkan modal, memperdagangkan praktik terbaik, dan ikut serta dalam kompetisi promosi mutakhir. Pada tahun 2023, Biban menjadi tuan rumah putaran final Entrepreneurship World Cup (EWC) yang menghadirkan hadiah uang tunai hingga \$1 juta. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, lebih dari 400.000 pengusaha dari seluruh dunia telah mendaftar untuk kompetisi promosi startup dan program dukungan tersebut. Selain sebagai forum untuk menciptakan peluang bagi ekosistem muda Arab Saudi yang subur, Biban juga mendorong kewirausahaan perempuan melalui pameran dan penghargaan berbasis kinerja (Bloomberg, 2023).

Selain itu, Arab Saudi juga telah sepakat dengan Korea Selatan untuk menciptakan landasan kerja sama antara UKM dan startup. Hal ini salah satunya diimplementasikan melalui acara Biban yang bekerja sama dengan Kementerian UKM dan Start Up Korea Selatan untuk menghadirkan stan perusahaan Korea Selatan pada

acara tersebut. Dalam hal ini, banyak perusahaan Korea Selatan yang menunjukkan minat untuk memasuki pasar Arab Saudi dan menghadiri Biban dengan rasio persaingan sebesar 15:1. Beberapa perusahaan yang terpilih antara lain Galaxy Corporation, NEXTON, Dot, The Pinkfong Company, Seculetter, OTOM, H2O Hospitality, Angelswing, WAVE Lifestyle Technologies, VEstellaLab (Seok, 2023). Kegiatan ini dapat menjadi peluang bagi para pengusaha perempuan yang ingin meningkatkan modal usahanya melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam hal ini, seiring berkembangnya lanskap kewirausahaan di Arab Saudi, perempuan akan terus menjadi kekuatan pendorong dalam perluasan ekosistem startup di Arab Saudi. Jika ambisi, ketabahan, dan kecerdikan telah mendorong mereka ke posisi kepemimpinan di sektor swasta yang sedang berkembang pesat di negara tersebut, maka dukungan sektor publik kemungkinan besar akan memberikan dampak yang berlipat ganda terhadap peluang ekonomi bagi pengusaha perempuan dan kesuksesan Visi 2030 di masa depan.

Lebih lanjut, Arab Saudi melalui Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, Monsha'at, dan Arab National Bank menjalani kemitraan dengan Visa sebagai "the world's leader in digital payments". Mereka meluncurkan She's Next sebagai program advokasi global yang bertujuan untuk mendukung usaha kecil milik perempuan melalui pendanaan, pelatihan, dan bimbingan. Sejak tahun 2020, Visa telah menginvestasikan sekitar \$3 juta dalam lebih dari 250 hibah dan pelatihan bagi perempuan pemilik UKM melalui program hibah She's Next secara global, termasuk di Amerika Serikat, Kanada, India, Irlandia, Ukraina, Kazakhstan, Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Maroko. Pengusaha perempuan dari seluruh industri dan sektor di Arab Saudi dapat mendaftar ke She's Next mulai Juni 2023. Bahkan, salah satu pemenang program tersebut dapat menerima hibah sebesar USD 50.000, program pelatihan yang disesuaikan, dan akses ke sumber daya She's Next Club, seperti perpustakaan lokakarya dan komunitas wirausaha. She's Next merupakan bagian dari upaya Visa untuk mendukung digitalisasi bisnis milik perempuan dan menampilkan peluncuran Indeks Digitalisasi UKM Perempuan pertama dari Visa yang mengukur kematangan digital menggunakan 5 indikator utama, yakni kehadiran online, penerimaan pembayaran digital, kesadaran keamanan pembayaran, keterlibatan pelanggan, dan retensi pelanggan (Arab News, 2023).

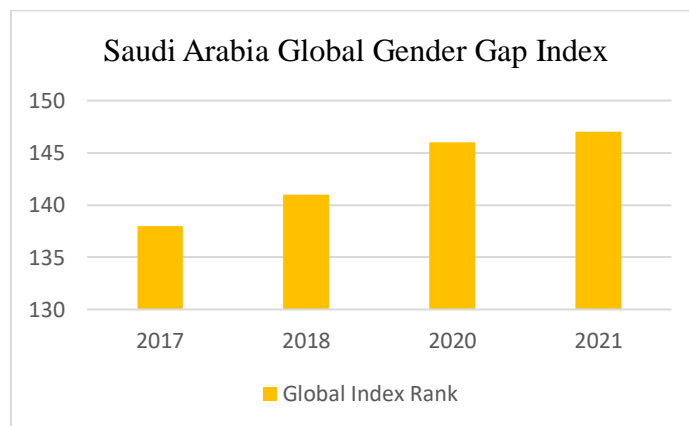
She's Next ini dapat memperkuat pentingnya perubahan mencapai kesuksesan Visi 2030 dan menunjukkan kemajuan yang dicapai oleh bisnis milik perempuan lokal dalam bergabung dengan ekonomi digital. Selain itu, usaha kecil dan menengah saat ini juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya kolaborasi teknologi pembayaran Visa ini tentu dapat membantu memberdayakan para

pengusaha untuk berkembang dan sukses di pasar yang kompetitif saat ini dan berkontribusi pada kesuksesan Visi 2030.

Kondisi Perempuan di Arab Saudi

Secara historis, Arab Saudi memiliki label sebagai negara maskulin. Hal ini berarti bahwa perempuan dipandang sebagai gender yang dibatasi dari keterlibatan di berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Negara maskulin seringkali mengeksplorasi interkoneksi antara gender, politik, dan agama yang membentuk pengucilan terus menerus terhadap perempuan Arab Saudi (Al-Rasheed, 2013). Perempuan dikonstruksikan sebagai anggota masyarakat yang dilindungi dan dikurung serta diperlakukan secara sistematis sebagai anak di bawah umur (Hodges, 2017). Narasi tersebut telah terwujud dalam pikiran laki-laki dan perempuan serta telah mengakar dalam peran sosial sehari-hari (West & Zimmerman, 1987). Oleh karena itu, hal tersebut telah menjadi aturan tidak tertulis yang mengatur perempuan dalam masyarakat Arab Saudi (Elamin & Omair, 2010). Berikut ini adalah peringkat Arab Saudi dalam Global Gender Gap Index tahun 2017-2021:

Gambar 1. Peringkat Arab Saudi dalam GGP Index Tahun 2017-2021



Pada 2018, Arab Saudi mengalami peningkatan dalam kesetaraan upah dan partisipasi angkatan kerja perempuan, dan kesenjangan yang lebih kecil dalam pendidikan menengah dan tinggi. Pada 2020, berdasarkan analisis WEF di 20 negara, dimana perempuan merupakan 40% dari angkatan kerja, Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan angka terendah, yakni 16% perempuan dari angkatan kerja. Sementara Swedia menjadi salah satu negara dengan angka tertinggi, yakni 48% perempuan dari

angkatan kerja (World Economic Forum, 2020). Pada 2021, Arab Saudi juga merupakan salah satu negara dengan kesenjangan gender dalam posisi manajerial tertinggi yakni 93% (World Economic Forum, 2021).

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa Arab Saudi berada di antara peringkat 10 terbawah selama tahun 2017-2021. Namun, pada tahun 2022, Arab Saudi berhasil meningkatkan peringkatnya yang pada awalnya di tahun 2017-2021 berkisar 138-147 secara keseluruhan, pada tahun 2022 Arab Saudi naik menduduki peringkat ke-127. Begitu pula peringkat berdasarkan sub-indeks peluang dan partisipasi ekonomi yang berada di peringkat 128 (World Economic Forum, 2022). Penulis mempersepsikan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Arab Saudi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik sesuai Visi Saudi 2030 yang salah satunya dilakukan melalui kebijakan luar negeri terkait kewirausahaan perempuan.

Visi Saudi 2030 memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap pembangunan *women entrepreneurship* di Arab Saudi. Inisiatif ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi dan mendukung peran perempuan dalam dunia bisnis. Berikut ini beberapa keterkaitan kunci antara Visi Saudi 2030 dengan pembangunan *women entrepreneurship* di Arab Saudi, yakni:

1. PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

Salah satu tujuan utama dari Visi Saudi 2030 adalah meningkatkan peran ekonomi perempuan dalam masyarakat. Dengan merangsang pengembangan kewirausahaan perempuan, visi ini bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi perempuan dan mendorong partisipasi aktif mereka di sektor bisnis.

2. DIVERSIFIKASI EKONOMI

Visi Saudi 2030 menekankan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak. Adapun mendorong kewirausahaan perempuan dapat membantu menciptakan keberagaman dalam ekonomi dengan menghadirkan ide, bakat, dan inovasi baru ke dalam berbagai sektor.

3. PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN

Dalam mendukung perempuan berwirausaha, Visi Saudi 2030 menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan. Inisiatif ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan perempuan dalam dunia bisnis, termasuk pelatihan kewirausahaan dan peningkatan akses ke pendidikan yang relevan.

4. Pemberdayaan Sosial

Visi Saudi 2030 berusaha untuk memperkuat pemberdayaan sosial, termasuk peran perempuan dalam masyarakat. Dengan memberdayakan perempuan melalui peluang wirausaha, inisiatif ini dapat menciptakan dampak positif pada status sosial dan ekonomi perempuan di Arab Saudi.

5. Peningkatan Partisipasi di Pasar Tenaga Kerja

Visi Saudi 2030 menargetkan peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Melalui pengembangan kewirausahaan perempuan, banyak perempuan dapat menjadi pengusaha atau berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja baru.

6. Promosi Inklusivitas Gender

Inisiatif ini juga mendorong inklusivitas gender dan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan dalam berbagai sektor, termasuk dunia bisnis. Langkah-langkah ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung perempuan dalam mengakses modal, sumber daya, dan peluang bisnis.

7. Kebijakan Dukungan dan Fasilitasi

Dalam konteks pembangunan women entrepreneurship, Visi Saudi 2030 dapat mencakup kebijakan dukungan dan fasilitasi yang spesifik untuk perempuan yang berwirausaha, seperti bantuan keuangan, akses ke jaringan bisnis, dan pengurangan hambatan administratif.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara Visi Saudi 2030 dan kewirausahaan perempuan menciptakan potensi untuk mengubah lanskap bisnis di Arab Saudi, memperkuat peran perempuan, dan menghasilkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang.

Women Entrepreneurship di Arab Saudi

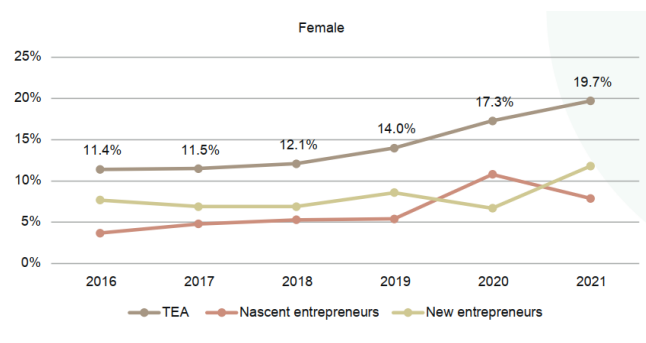
Arab Saudi menyadari pentingnya pemberdayaan perempuan dalam perekonomian agar tidak menciptakan populasi perempuan yang menganggur, melainkan berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Pada 2006, penekanan yang meningkat pada Saudisasi yang diterapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja telah berpengaruh pada meningkatnya partisipasi perempuan Arab Saudi dalam angkatan kerja. Saudisasi merupakan upaya nasionalisasi pekerjaan dengan

melakukan penggantian pekerja asing dengan orang Arab Saudi melalui kuota. Dalam hal ini, perempuan mendapat manfaat dari jalur Saudisasi yang berfokus pada gender (Jamjoom, 2023).

Lebih lanjut, kebijakan pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan pada Juni 2018 juga memiliki dampak besar pada cara perempuan menjalani kehidupan pribadi dan profesional mereka. Kebebasan bergerak tersebut memungkinkan perempuan untuk mengambil kepemilikan atas hidup mereka sendiri dan atas pergerakan mereka sendiri. Pada 2019, Putri Reema binti Bandar Al Saud juga ditunjuk sebagai Duta Besar wanita Arab Saudi pertama untuk Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan sebuah kemajuan bahwa wanita bisa mencapai jajaran menteri (Renard, 2014). Sejak Juli 2019, sistem perwalian laki-laki juga telah dihapus dan meningkatkan praktik gender di tempat kerja serta masyarakat luas (Al-Rasheed, 2013). Pada 2021, Rania Nashar diangkat sebagai Kepala Kepatuhan dan Tata Kelola Dana Investasi Publik Arab Saudi. Hal tersebut merupakan penanda perubahan positif bagi negara (Renard, 2014). Selain itu, perubahan-perubahan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh diluncurkannya Saudi Vision 2030 oleh Mohammad bin Salman yang salah satunya tujuannya adalah meningkatkan partisipasi wanita dalam angkatan kerja dari 22% hingga 30% (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, 2018).

Ketika Arab Saudi mulai mengimplementasikan Saudi Vision 2030 tersebut, terutama dalam komponen kunci yang berfokus pada insiatif dan kebijakan pemberdayaan perempuan, perempuan Arab Saudi kemudian mengambil setiap kesempatan untuk mendapatkan izin usaha untuk mendirikan bisnis mereka di Arab Saudi. Bisnis baru yang digerakkan oleh para wanita tersebut mencakup pertokoan, perusahaan teknologi, dan perusahaan rintisan yang mempengaruhi peningkatan wirausaha wanita di Arab Saudi (Zawya, 2022). Berikut ini data pengusaha wanita berdasarkan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Kingdom of Saudi Arabia 2016-2021 (Kelly, Roomi, Hashmi, & Coduras, 2022):

Gambar 2. Data Pengusaha Wanita Berdasarkan GEM KSA 2016-2021



Source: GEM Kingdom of Saudi Arabia, 2016-2021

TEA merupakan Total Entrepreneurial Activity yang terdiri dari dua fase, yakni nascent entrepreneur (pengusaha baru lahir) dan new entrepreneurs (pengusaha baru). Nascent entrepreneur adalah mereka yang telah mengambil langkah material untuk memulai usahanya namun baru berdiri dan berjalan kurang dari 3 bulan. Kemudian ketika mereka telah berdiri dan berjalan selama lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 3,5 tahun, mereka tergolong new entrepreneurs. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa dari 2016 sampai 2021 terjadi peningkatan total aktivitas usaha perempuan di Arab Saudi, walaupun presentase pengusaha baru bersifat fluktuatif, tetapi tren pengusaha baru lahir menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2020.

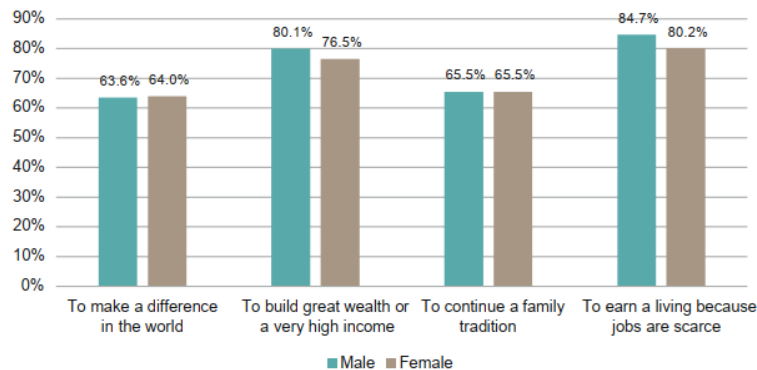
Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi melaporkan bahwa terjadi peningkatan 112% dalam pendaftaran komersial yang dikeluarkan untuk pengusaha perempuan dalam enam tahun sejak 2015. Menurut GoDaddy Commercial Strategy Senior Director, Selina Bieber, dalam hal ini perempuan Arab Saudi telah memperoleh keuntungan yang signifikan dalam bisnis melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Saudi Vision 2030. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Saudi Vision 2030 menekankan peran usaha kecil menengah dalam ekonomi, dan ketika kewirausahaan yang dipimpin perempuan tumbuh secara eksponensial, Arab Saudi juga menyaksikan perubahan drastis dalam bisnis ekonominya. Bieber mengungkapkan bahwa peran yang semakin penting dari usaha kecil yang dipimpin perempuan akan dimainkan tidak hanya dalam pemulihan ekonomi, tetapi juga kemakmurannya selama bertahun-tahun ke depan (Zawya, 2022). Arab Saudi meyakini bahwa menanam investasi dalam potensi perempuan di tingkat lokal akan membantu mereka memperkuat masa depan negara dan ikut serta dalam memajukan masyarakat serta ekonomi yang memiliki dampak yang sangat signifikan (Issac, 2023).

Menurut laporan Pemerintah Arab Saudi, jumlah pendaftaran komersial yang dilakukan atas nama pengusaha wanita Arab Saudi mencapai 139.754 pada Juli 2021. Mereka terutama dilaporkan berada di sektor jasa, beroperasi di berbagai industri dari desain, pendidikan hingga perkebunan dan manufaktur. Bieber juga mengungkapkan bahwa dengan lebih dari 50% lulusan universitas adalah perempuan. Perempuan Arab Saudi telah dianggap sebagai asset besar bagi pertumbuhan Arab Saudi. Ketika memberikan pengusaha wanita pendidikan, dukungan, dan kesempatan yang tepat dapat membantu negara untuk memanfaatkan sumber daya yang besar dan menjadikan kewirausahaan sebagai faktor pendorong dalam perekonomian (Zawya, 2022).

Berdasarkan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Kingdom of Saudi Arabia, berikut ini adalah motivasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memulai sebuah usaha pada tahun 2021 (Kelly, Roomi, Hashmi, & Coduras, 2022):

Gambar 3. Motivasi Perempuan dan Laki-Laki Arab Saudi dalam Memulai Usaha Berdasarkan GEM KSA Tahun 2021

Figure 8. Motivations for starting a business among entrepreneurs in Saudi Arabia, 2021



Source: GEM Kingdom of Saudi Arabia, 2021

Berdasarkan grafik di atas, motivasi paling tinggi perempuan dan laki-laki dalam membangun usaha adalah untuk mencari nafkah karena kelangkaan pekerjaan, yakni sebesar 80,2% (perempuan) dan 84,7% (laki-laki), kemudian untuk mencapai kekayaan dan pendapatan yang tinggi sebesar 76,5% (perempuan) dan 80,1% (laki-laki), untuk melanjutkan tradisi keluarga sebesar 65,5% (perempuan dan laki-laki), dan terakhir untuk menciptakan perbedaan di dunia sebesar 64,0% (perempuan) dan 63,6% (laki-laki). Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki motivasi yang sangat mirip untuk memulai usaha. Walaupun wanita cenderung memiliki motif keuangan (membangun kekayaan atau kelangkaan pekerjaan) tersebut masih menjadi alasan yang paling sering dikutip untuk kedua jenis kelamin.

Simpulan

Orientasi kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait perempuan dalam kerangka Visi 2030 telah beralih dari perekonomian yang bergantung pada minyak mentah menjadi Arab Saudi sebagai tujuan wisata, pusat keuangan dan komersial, serta pusat perdagangan eksportir terkemuka energi bersih dengan melibatkan kontribusi perempuan terhadap perekonomian dan partisipasi mereka dalam pembangunan sosial. Komitmen atau rencana tindakan kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait perempuan ditunjukkan melalui rencana induk ambisius yang mencakup tiga aspek, yakni: (1) melakukan diversifikasi ekonomi berbasis minyak untuk menggabungkan teknologi dan

pariwisata; (2) menjadikan Arab Saudi sebagai jantung Islam dan budaya Arab, dan; (3) menjadi negara yang maju pusat ekonomi dan geografis yang menghubungkan tiga benua, dengan ketiga hal tersebut melibatkan peran perempuan di dalamnya. Bentuk perilaku dari kebijakan luar negeri terkait perempuan diimplementasikan melalui: (1) kerja sama dengan Swedia melalui SHE-Leads Program; (2) keterlibatan Arab dalam konferensi internasional tentang “Perempuan dalam Islam: Status dan Pemberdayaan” bersama OKI; (3) melalui CBD Corporate Service memberikan wawasan tentang lanskap bisnis Arab Saudi kepada pengusaha perempuan Inggris; (4) kerja sama dengan Kementerian UKM dan Start Up Korea terkait keterlibatan perusahaan Korea di Biban; (5) menjalani kemitraan dengan Visa dalam meluncurkan She’s Next sebagai program advokasi global yang bertujuan untuk mendukung usaha kecil milik perempuan melalui pendanaan, pelatihan, dan bimbingan.

Daftar Pustaka

- Adami, A., & Moshtaghi, A. (2020). Saudi Arabia's Foreign Policy Patterns Based on 2030 Vision. *The Fundamental and Applied Studies of Islamic World*. 2(5), pp. 100-130.
- Alhussein, E. (2014, Juli). Triangle of Change: the Situation of Women in Saudi Arabia. [online] Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Dalam: <https://www.files.ethz.ch/isn/181922/ef4fe5e44ede4d362d60a6804ed40437.pdf> [Diakses 23 Mei 2023]
- Aljazeera. (2015, Januari 24). King Abdullah Had Mixed Record on Saudi Women's Rights. [online] Dalam: <http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/23/king-abdullah-saudi-womens-rights.html> [Diakses 20 Mei 2023]
- Al-Rasheed, M. (2013). *A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia*. New York: Cambridge University Press.
- Alreshoodi, S. A., Rehman, U. A., Alshammari, S. A., Khan, T. N., & Moid, S. (2022). Women Entrepreneurs in Saudi Arabia: A Portrait of Progress in the Context of Their Drivers and Inhibitors. *Journal of Enterprising Culture*, 375-400. doi:<https://doi.org/10.1142/S0218495822500121>
- Al-Sanea, F. b. (2022). Gender Inequality in Saudi Arabia. *Journal Future of Social Sciences*, 24-76.
- Arab News. (2023, May 25). Visa Launches Initiative to Support Women Entrepreneurs in Saudi Arabia. [online]. Dalam:

<https://www.arabnews.com/node/2310416/business-economy> [Diakses 20 Juli 2023]

Atta, I. (2023, May 10). From Confrontational to Subtle Diplomacy: The Reorientation of Saudi Foreign Policy. [online] Gulf International Forum. Dalam: <https://gulfif.org/from-confrontational-to-subtle-diplomacy-the-reorientation-of-saudi-foreign-policy/> [Diakses 15 Agustus 2023]

Bloomberg. (2023). Female Entrepreneurship: Transforming the Saudi Economy. [online] Dalam: <https://sponsored.bloomberg.com/article/Monshaat/female-entrepreneurship-transforming-the-saudi-economy> [Diakses 20 Juli 2023]

Elamin, A. M., & Omair, K. (2010). Males' Attitudes Towards Working Females in Saudi Arabia. *Personal Review*, 39, 746-766. doi:<https://doi.org/10.1108/00483481011075594>

Farouk, Y., & Brown, N. J. (2021). Saudi Arabia's Religious Reforms Are Touching Nothing but Changing Everything. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Ganapathy, S., & Mayilsamy, C. (2013). Women Entrepreneurship: A Global Perspective. *Indian Journal of Applied Research*, 3-5. Dalam: https://www.researchgate.net/publication/280934018_Women_Entrepreneurship_-_A_Global_Perspective [Diakses 20 Juli 2023]

Ho, M. (2019, May 27). Saudi Arabia: The Changing Role of Women. [online] HKTDC Research. Dalam: <https://research.hktdc.com/en/article/MzQ1OTIzMjY1> [Diakses 20 Agustus 2023]

Hodges, J. (2017). Cracking The Walls of Leadership: Women in Saudi Arabia. *Gender in Management: An International Journal*, 32(1), 34-46. doi:<https://doi.org/10.1108/>

Issac, N. (2023, May 3). The Power of Purpose: How Women Entrepreneurs in KSA are Changing the Business Landscape. [online] Entrepreneur Asia Pacific. Dalam: <https://www.entrepreneur.com/en-au/women-entrepreneur/the-power-of-purpose-how-women-entrepreneurs-in-ksa-are/450915> [Diakses 15 Juni 2023]

Jacobs, A. (2023, September 14). Understanding Saudi Arabia's Recalibrated Foreign Policy. [online] International Crisis Group. Dalam: <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/saudi-arabia/understanding-saudi-arabias> [Diakses 15 Juni 2023]

Jamjoom, L. A. (2023). *Women Business Leaders*. New York: Routledge.

Kelly, D., Roomi, M. A., Hashmi, N., & Coduras, A. (2022). Kingdom of Saudi Arabia Women's Report 2021-2022. King Abdullah Economic City: Prince Mohammed Bin Salman College.

Kingdom of Saudi Arabia. (2016). Leadership Message. [online] Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. Dalam: <https://www.vision2030.gov.sa/en/vision-2030/leadership-message/> [Diakses 20 Agustus 2023]

Kingdom of Saudi Arabia. (2016). Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia.

Kingdom of Saudi Arabia. (2022). Saudi Arabia Vision 2030 The Journey So Far. Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis. Los Angeles: Arizona State University.

Ministry for Foreign Affairs Government Offices of Sweden. (2019). Handbook Sweden's Feminist Foreign Policy. Stockholm: Ministry for Foreign Affairs Government Offices of Sweden. [online] Dalam: <https://www.government.se/492c36/contentassets/fc115607a4ad4bca913cd8d11c2339dc/handbook---swedens-feminist-foreign-policy---english.pdf> [Diakses 10 Juli 2023]

Neack, L. (2019). Studying Foreign Policy Comparatively. London: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.

Organisation of Islamic Cooperation. (2023, 11 4). OIC Organizes and Saudi Arabia Hosts the International Conference on "Women in Islam". [online] Organisation of Islamic Cooperation. Dalam: https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=39858&t_ref=26735&lan=en [Diakses 15 Juli 2023]

Pardo, S. B. (2023, March 27). Saudi Arabia Trade Mission Puts Female Entrepreneurs in Spotlight. [online] International Accounting Bulletin. Dalam: <https://www.internationalaccountingbulletin.com/news/saudi-arabia-trade-mission-puts-female-entrepreneurs-in-spotlight/?cf-view> [Diakses 15 Agustus 2023]

Potter, L. G. (2017). Saudi Arabia in Transition. Foreign Policy Association, [online] 51-64. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/44215463> [Diakses 10 Juli 2023]

- Rasooldeen, M. (2017, October 26). Sweden to train female Saudi entrepreneurs. Arab News [online]. Dalam: <https://www.arabnews.com/node/1183241/saudi-arabia> [Diakses 4 Agustus 2023]
- Renard, A. L. (2014). *Society of Young Women: Opportunities of Place, Power, and Reform in Saudi Arabia*. California: Stanford University Press.
- Rosenau, J. N. (1976). *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Seok, P. M. (2023, March 13). Saudi Arabia's Largest Startup Conference Biban Opens the Door to the Middle East Market for Korean SMEs and Startups. Excellent Magazine [online]. Dalam: <https://www.excellent-n.com/news/articleView.html?idxno=3151> [Diakses 5 Mei 2023]
- Syed, J., Ali, F., & Hennekam, S. (2018). Gender Equality in Employment in Saudi Arabia: A Relational Perspective. *Career Development International*, 163-177. doi:10.1108/CDI-07-2017-0126
- The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia. (2018). Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. [online] Dalam: <https://www.saudiembassy.net/vision-2030> [Diakses 5 Juni 2023]
- Tiwari, N. (2017). Women Entrepreneurship in India: A Literature Review. *Amity Journal of Entrepreneurship*, [online] 2(1), 47-60. Dalam: <https://amity.edu/UserFiles/admaa/db0c0Paper%204.pdf> [Diakses 10 Mei 2023]
- Trofimov, Y. (2019). A Social Revolution in Saudi Arabia. [online] *The Wall Street Journal*. Dalam: <https://www.wsj.com/articles/a-social-revolution-in-saudi-arabia-11573833669> [Diakses 15 Juni 2023]
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. *Gender & Society*, [online] 1(2), 125-151. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/189945> [Diakses 12 Juni 2023]
- Winarni, L., & Permana, A. P. (2022). Saudi Vision 2030 and the Challenger of Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia. *Journal of Islamic World and Politics*, [online] 104-121. Dalam: <https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i1.14579> [Diakses 10 Juni 2023]
- Wirkkala, M. (2023). *SHE Leadership Programme*. Stockholm: Swedish Institute .
- World Economic Forum. (2017). *Global Gender Gap Report 2017*. Geneva: World Economic Forum.

World Economic Forum. (2017). The Global Gender Gap Report 2017. Geneva: World Economic Forum. [online] Dalam: <https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017> [Diakses 5 Juni 2023]

World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. Geneva: World Economic Forum.

World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021. Geneva: World Economic Forum.

World Economic Forum. (2022). Global Gender Gap Index 2022. Geneva: World Economic Forum.

Zawya. (2022, November 30). Women-led Entrepreneurship in KSA: A New Phase Ahead. [online] Dalam: <https://www.zawya.com/en/press-release/people-in-the-news/women-led-entrepreneurship-in-ksa-a-new-phase-ahead-bmr1ac11> [Diakses 5 Juli 2023]